

**Implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Semarang**

**(Studi Kasus Pada Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang)**

Harwindo adhikaputra, Zainal Hidayat, Mochmad Mustam

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Various problems such as lack of public awareness of the Semarang District particular demographic data ownership birth certificate into the background of this research. This study aims to determine how the implementation of Semarang District Regulation No.7 of 2009 on Population Administration in Semarang district and identify factors driving and inhibiting in the implementation of the registration and recording of population. This study uses descriptive qualitative research methods. The subjects in this study consists of six (6) key informants.

The results showed that the implementation of Semarang District Regulation No.7 of 2009 on Population Administration shows that walking good implementation. But Less Her amount of resources to be a problem that must be faced by the Department of Population and Civil Registration Semarang district in providing services to the public, as well as the transitional administration system administration manual to computer systems that have not been synchronized, causing inaccuracies in the data has. And the lack of public awareness that has been aged for ownership of population data to itself.

Based on these conclusions, the researchers recommend to the executive population registration and civil registration in order to encourage dissemination to the public to register themselves in the Department of Population and Civil Registration Semarang district and implementing e-government in the implementation of the settlement administration.

Keyword : Implementation, proglocal regulation of semarang district, socialization

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara yuridis penyelenggaraan administrasi kependudukan tersurat dalam UU Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dikutip dari penjelasan atas UU Republik Indonesia No.24 Tahun 2013, dikatakan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Laju pertumbuhan penduduk yang besar di Kabupaten Semarang membuat semakin pentingnya pendataan terhadap penduduknya. Pencatatan data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Oleh karena itu

dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Semarang harus diimbangi dengan perbaikan terhadap pencatatan data kependudukan. Dengan begitu informasi kependudukan akan lebih lengkap, akurat dan mudah untuk didapat.

Dalam rangka mewujudkan pendataan kependudukan yang baik, pemerintah mengadakan berbagai pelayanan administratif, salah satunya adalah pencatatan sipil seperti pelayanan pembuatan akta kelahiran. Akta kelahiran mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan seorang warga negara, karena hal tersebut menjamin keberadaan, identitas sebagai warga negara dan hak-hak sipil yang dapat diperoleh seorang warga negara. Oleh karena itu pelayanan tersebut penting untuk dilaksanakan mengingat fungsinya yang sangat penting bagi seorang warga negara. Dengan adanya perbaikan terhadap pelayanan administratif akan mendorong kemajuan dalam pelayanan publik dan pembenahan kelengkapan data administrasi publik.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan untuk

mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

1.3 Kajian Pustaka

Kebijakan Publik

Thomas R.dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Artinya adalah agar tujuan negara tercapai, pemerintah berhak untuk menentukan kebijakan yang dianggap tepat untuk diterapkan dan yang kurang tepat untuk diterapkan. Hal itu dilakukan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki daya guna besar bagi masyarakat. (Suwitri,2011:9-11).

Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (William N.Dunn,2003:22).

Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan,

keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Indiahono, 2009:31-33).

Kinerja Impelentasi Kebijakan

Kegagalan ataupun keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan, dalam literatur studi implementasi kemudian di konseptualisasikan sebagai kinerja implementasi (Purwanto & Sulistyastuti, 2012:98). Kinerja suatu kebijakan adalah tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan (policy outtput), maupun hasil kebijakan (policy outcome) (Purwanto & Sulistyastuti, 2012:98). Penilaian terhadap suatu kinerja (Performance measurement) merupakan sesuatu yang penting, karena dengan penilaian terhadap kinerja seorang peneliti dapat menentukan tinggi-rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan.

Indikator *Policy Output*

Indikator *output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi, dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012:106).

Menurut cf.Ripley dalam purwanto & sulistyastuti (2012:106-110), berbagai indikator dapat digunakan untuk menilai kualitas *policy output* adalah sebagai berikut: akses, cakupan, frekuensi, *service delivery*, akuntabilitas.

2. METODOLOGI

2.1 Desain Penelitian

Di dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Perda No.7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Semarang” ini digunakan metode penelitian kualitatif.

2.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

2.3 Subjek Penelitian

Kepala bidang pencatatan sipil, Kepala seksi kelahiran dan kematian,

Pegawai bagian pelayanan Dispendukcapil Kab.Semarang, dan Masyarakat

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERDA NO.7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

3.1 Akses dan Cakupan

Dalam pelaksanaan tugas nya di bidang pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang berupaya agar seluruh warga Kabupaten Semarang dapat terlayani dalam proses pembuatan dan pendaftaran data kependudukan, seperti KTP, KK dan akta kelahiran serta agar warga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang secara rutin melakukan kegiatan jemput bola yang dilaksanakan sebanyak 64 kali dalam setahun. Kegiatan ini di prioritaskan untuk daerah daerah yang lokasi nya jauh dari pusat kota Kabupaten Semarang.

3.2 Service Delivery

Dalam hal pendaftaran dan penerbitan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang memiliki SOP dan pedoman mutu yang sudah bersertifikat ISO. Dimana dalam pedoman mutu tersebut diatur prosedur dan standar dalam pendaftaran dan pencatatan penduduk.

Sedangkan untuk fasilitas yang dimiliki oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat sudah baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya sistem antrian yang baik. Dikatakan baik karena ada mesin pengambilan nomor antrian, lalu pemanggilan nomor antrian sudah menggunakan speaker dan papan nomor antrian. Selain itu ruang tunggu memiliki banyak kursi sehingga masyarakat ketika menunggu tidak ada yang berdiri serta ruang tunggu tersebut memiliki AC, sehingga ruang tidak panas. hal tersebut membuat masyarakat nyaman ketika menunggu antrian.

3.3 Komunikasi

bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang adalah dalam bentuk sosialisasi. Hal-hal yang di sosialisasikan meliputi prosedur

pembuatan / pendaftaran data kependudukan dan pencatatan sipil, mengenai pentingnya kepemilikan data kependudukan sehingga diharapkan timbulnya kesadaran warga untuk mendaftarkan data dirinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain sosialisasi, pihak Dinas juga memberikan brosur-brosur yang berisi tatacara dan prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sosialisasi dilakukan di balai kelurahan seluruh Kabupaten Semarang, perwakilan warga dari tiap RT dan RW dikumpulkan untuk diberikan materi sosialisasi.

Akan tetapi tidak semua warga yang diundang dalam kegiatan sosialisasi tersebut, sehingga ada warga yang tidak mendapatkan informasi tentang kegiatan administrasi kependudukan. Lalu kesadaran masyarakat yang kurang meskipun telah dilakukan sosialisasi khususnya untuk orang-orang yang sudah berusia dan merasa tidak membutuhkan akta kelahiran lagi.

3.4 Sumber Daya

dalam pelaksanaan tugas di Bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup untuk menjalankan fungsi dari masing-masing

bidang, akan tetapi jika ada pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, sedang menjalankan program jemput bola atau ijin tidak masuk kerja, kantor jadi kekurangan tenaga sehingga para pegawai harus bergantian menutupi posisi yang ditinggal tersebut.

Untuk proses input data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang memiliki 8 petugas input data, dan ke delapan petugas tersebut dibagi dalam tugas dan fungsi nya masing-masing. ada petugas input data akta kelahiran, akta kematian, perkawinan, pendaftaran KTP baru, dan pelayanan pendaftaran penduduk dan dari 8 petugas input itu dibagi 4 untuk pencatatan sipil dan 4 untuk bagian kependudukan.

Perpindahan sistem administrasi kependudukan yang lama ke sistem informasi administrasi kependudukan yang baru belum sepenuhnya berhasil, hal itu dikarenakan tidak sinkron nya sistem yang lama dengan yang baru. Akibat nya harus dilakukan pendataan ulang terhadap kepemilikan akta kelahiran. Dan untuk melakukan sinkronisasi data dibutuhkan keterampilan pegawai dalam hal tersebut.

3.5 Struktur Birokrasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayan sesuai dengan standar prosedur yang ada dan memiliki pedoman mutu yang sudah bersertifikat ISO 9001:20081 dan Mengingat bahwa instansi ini melayani masyarakat dan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SOP. Jadi pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan waktu pengerjaan. Setiap tahapan pengerjaan melalui kontrol sehingga tepat waktu

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Implementasi Perda No.7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam upaya mencakup dan memberikan kemudahan akses pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kabupaten Semarang sudah baik, hal ini karena adanya program-program yang telah dilaksanakan serta adanya standar prosedur pelayanan yang telah bersertifikat ISO dan selalu rutin dilakukan evaluasi.

Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kepada masyarakat dalam hal pendaftaran kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Semarang sudah baik. Hal ini terlihat dari lengkapnya fasilitas yang dimiliki dan pelayanan yang memiliki sertifikasi ISO serta rutin dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No.7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan serta pengetahuan masyarakat terhadap tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum efektif dan kurang baik dalam pelaksanaanya. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan identitas kependudukan. Hal lain nya adalah komunikasi yang dilakukan tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Belum adanya integrasi antara sistem administrasi lama dengan sistem administrasi kependudukan yang baru ini. Sehingga menimbulkan data yang tidak

akurat terhadap kepemilikan akta kelahiran.

Mekanisme pelayanan merupakan hal yang penting dalam prosedur pelayanan yang prima. Prosedur pelayanan yang baik adalah yang sederhana dan mempermudah pengguna layanan. Kemudahan tahapan pelayanan dilihat dari kesederhanaan alur pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas nya di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selalu mengikuti SOP yang ada dan berpedoman pada pedoman mutu pelayanan yang sudah bersertifikat ISO tersebut.

4.2 Saran

Implementasi Perda No.7Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus selalu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, terlebih dalam hal memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat. Alangkah lebih baik jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menerapkan e-government dalam pendaftaran dan pencatatan sipil. Hal ini dirasa penting

karena jumlah sumberdaya manusia dan kendaraan operasional yang kurang untuk menjalankan beberapa program seperti kegiatan jemput bola.

Untuk terus menjaga kualitas pelayanan yang baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang harus secara rutin melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan serta petugas-petugas nya.

Dinas Kependudukan harus selalu berupaya untuk terus menjaga dan meningkatkan konsistensi kinerja dan kualitas pelayanan tersebut. Dengan rutin mengadakan evaluasi terhadap kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No.7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Mengoptimalkan pemanfaatan media cetak, audio dan visual serta menggalakan kegiatan sosialisasi yang lebih intens dalam rangka pemberian informasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan bagaimana tatacara pembuatan serta pendaftaran administrasi kependudukan. sehingga

masyarakat tumbuh kesadarannya untuk segera mengurus data kependudukan dan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

fasilitas yang sudah dimiliki oleh Dinas Kependudukan saat ini harus dijaga dan dirawat dengan baik. Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus selalu berupaya meningkatkan standar pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang harus segera mengupayakan integrasi antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Supaya data yang dimiliki akurat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas nya di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selalu mengikuti SOP yang ada dan berpedoman pada pedoman mutu pelayanan yang sudah bersertifikat ISO tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang harus terus konsisten menerapkan pelayanan yang prima yang sesuai dengan pedoman mutu yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, N. William. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Suwitri, Sri. 2011. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Winarno, Budi. 2012. Adiministrasi Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Subagyo, P. Joko. 2006. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung : Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic, Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta : Rajawali Pers.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gava Media
- Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2013
- BPS : Kabupaten Semarang dalam angka Tahun 2013

